

## Analisis Penerapan Aplikasi Back Office Selindo pada Manajemen Anggaran di BPS Kota Banda Aceh

Siti Rahmah. R<sup>1</sup>, Ivon Jalil<sup>2</sup>, Fitria Mandaraira<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Ekonomi Manajemen, UTU Meulaboh, Indonesia, e-mail: siti082284449233@gmail.com

### Histori Naskah

Diserahkan:  
19-07-2024

Direvisi:  
23-07-2024

Diterima:  
24-07-2024

### ABSTRACT

*Back Office Selindo (BOS) is an integrated management information system that accompanies the APBN cycle within the Central Statistics Agency. This application is designed for managing budgets and finances issued by the government in an effort to achieve good governance, so proper understanding is required from the managers. The aim of this research is to analyze the implementation of the Selindo Back Office application, the benefits and obstacles to the budget management system at BPS Banda Aceh City. This research method is descriptive qualitative. Data was collected through a direct interview process with research informants. The results of the interviews and data that had been collected were analyzed using descriptive methods. The results of the research show that the implementation of the Back Office Selindo application in Budget Management at BPS Banda Aceh City includes planning and budgeting modules, work plan and budget determination modules, budget implementation modules, recording and reporting and monitoring and evaluation modules. So the aim of implementing the Selindo Back Office application is to produce reports and financial information in a timely, complete, accurate and reliable manner in accordance with applicable regulations and to encourage the realization of good governance in general and the implementation of regional financial management by providing a regional financial management system based on information technology in particular.*

**Keywords** : *Implementation, Selindo Back Office Application, Budget Management*

### ABSTRAK

Aplikasi Back Office Selindo (BOS) merupakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam menyertai siklus APBN di lingkungan Badan Pusat Statistik. Pemahaman yang tepat dari para pengelolanya diperlukan dalam tata kelola anggaran dan keuangan pemerintah yang diterbitkan melalui aplikasi ini, dengan tujuan mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan aplikasi Back Office Selindo, manfaat dan hambatan pada sistem manajemen anggaran di BPS Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan informan penelitian. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Back Office Selindo pada Manajemen Anggaran di BPS Kota Banda Aceh yaitu mencakup modul perencanaan dan penganggaran, modul penetapan rencana kerja dan anggaran, modul pelaksanaan anggaran, modul pencatatan dan pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Maka tujuan dari penerapan aplikasi Back Office Selindo ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan menyediakan sistem yang menghasilkan laporan dan informasi keuangan yang lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Penerapan, Aplikasi Back Office Selindo, Manajemen Anggaran

**Corresponding Author** : Ivon Jalil, UTU Meulaboh, Indonesia, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Indonesia, 23681, e-mail: ivonjalil@utu.ac.id

## PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban manusia didorong oleh berbagai faktor, salah satunya ialah perkembangan teknologi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peradaban tersebut. Peranan penting teknologi dalam menentukan kemajuan perusahaan dan instansi menjadi sangat krusial terutama di era teknologi informasi yang kini tengah melanda dunia. Kadir (2016) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan akan alat pengolah data yang dapat menyajikan informasi relevan.

Perusahaan, instansi, maupun lembaga sangat bergantung pada sistem informasi sebagai salah satu komponen krusial. Kualitas informasi yang disajikan serta pengambilan keputusan dapat terjamin melalui penerapan sistem informasi pada perusahaan, instansi, maupun lembaga. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kualitas sistem teknologi pemerintahan, yang dikenal sebagai *e-Government*, dilakukan secara bertahap oleh pemerintah seiring perkembangan zaman (Gunardi, et al., 2019).

Berdasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik, dibentuklah Biro Pusat Statistik, yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. Lembaga Pemerintah Non Kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pusat Statistik, sebelumnya bernama Biro Pusat Statistik, secara resmi berganti nama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sebagai pengganti dua undang-undang sebelumnya (Ningsih et al., 2018). Berdasarkan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik bertanggung jawab atas penyediaan data statistik dasar, baik untuk keperluan pemerintah maupun masyarakat umum, serta mencakup lingkup nasional dan regional. Petugas yang direkrut dari beragam kalangan oleh BPS Kota Banda Aceh untuk membantu dalam proyek berskala besar, seperti sensus dan survei yang membutuhkan banyak sumber daya manusia, dikenal sebagai "Mitra Statistik" <http://bandaacehkota.bps.go.id/>.

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas kinerja dalam pengelolaan data, BPS atau Badan Pusat Statistik saat ini sangat membutuhkan dukungan dari Mitra Statistik. Setiap bulan Mitra Statistik di BPS Kota Banda Aceh menerima gaji sebagai imbalan dari hasil kerjanya. Dalam rangka memmanifestasikan visi organisasi melalui misi yang telah dipilih, implementasi dan pemantauan rencana kegiatan, serta perencanaan berbagai kegiatan terkait, dilakukan dengan menggunakan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen (SPPM).

Alokasi sumber daya selama kurun waktu satu tahun dalam mendukung program-program perusahaan yang telah digencarkan merupakan kegiatan perencanaan keuangan yang dikenal sebagai penyusunan anggaran. Rencana kegiatan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan program-program beserta penunjukan karyawan yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan penggunaan sumber daya tiap program tersebut, diuraikan dalam penyusunan anggaran. Berlandaskan hal tersebut, peran krusial kegiatan penyusunan anggaran dalam keseluruhan proses perencanaan dan pengendalian manajemen di suatu organisasi menjadikannya suatu hal yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai upaya menciptakan tata keuangan dan lembaga secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka pada Tahun 2022 BPS Kota Banda Aceh menerapkan aplikasi *Back Office Selindo* (BOS) untuk sistem manajemen anggaran. Pemahaman yang tepat dari para pengelolanya diperlukan dalam tata kelola anggaran dan keuangan pemerintah yang diterbitkan melalui aplikasi ini, dengan tujuan mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik. Namun masih terdapat kendala dalam penerapan aplikasi *Back Office Selindo*, dimana pihak karyawan dari BPS Kota Banda Aceh belum sepenuhnya memahami tentang BOS tersebut, sehingga didalam merancang penganggaran masih banyak yang salah dan melakukannya melalui perancangan manual (Artawan & Suhartana, 2019).

Penelitian terkait penerapan aplikasi *Back Office Selindo* (BOS) dalam proses perencanaan dan penganggaran di BPS Kota Banda Aceh menjadi sangat penting. Hal ini didasari oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki BPS Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan aplikasi BOS yang baru diterapkan, serta penegasan bahwa pengalokasian anggaran harus sesuai dengan fungsi masing-masing unit di BPS Kota Banda Aceh melalui penerapan aplikasi tersebut. Masih kurangnya pengetahuan karyawan tentang aplikasi BOS, sehingga berdampak terhadap kesiapan karyawan dalam mengaplikasikan *Back Office Selindo* masih rendah, sehingga untuk mengoptimalkan aplikasi BOS tersebut masih mendapat hambatan dalam penyusunan penganggaran dan pembuatan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian dari Saputra, S., & Prasetyo (2022), menunjukkan pembuatan dan implementasi aplikasi *back office* ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memonitoring kinerja dari aplikasi utamanya (aplikasi mobile berbasis android) dimana aplikasi ini digunakan oleh *end user*, dan aplikasi *back office* ini bisa digunakan pula oleh admin perusahaan untuk memonitoring dan membuat laporan kinerja sehari-hari.

BPS Kota Banda Aceh memiliki 33 karyawan, namun hanya 2 orang operator yang bisa mengoperasikan dan mengetahui *back office selindo*. Dalam proses pengolahan serta pemeriksaan data yang memerlukan waktu yang relatif lama karena semua data masih berupa tulisan tangan dan dokumen cetak. Pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat akan mempengaruhi keputusan terkait manajemen penganggaran di BPS Kota Banda Aceh (Profil BPS Kota Banda Aceh, 2023). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis penerapan aplikasi *back office selindo* pada manajemen anggaran di BPS Kota Banda Aceh.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Adopsi Teknologi

*User Acceptance* dapat diartikan sebagai keinginan organisasi atau individu untuk menggunakan teknologi informasi (TI) yang dirancang untuk membantu suatu pekerjaan. Penerimaan pengguna akan secara signifikan mempengaruhi keberhasilan implementasi TI, akibatnya penerimaan pengguna harus dianggap sebagai faktor integral yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penggunaan teknologi informasi (Sutjipto, 2020).

*User Acceptance Testing* merupakan pengujian akhir dari pengembangan sebuah produk untuk memvalidasi bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang optimal sehingga dibutuhkan evaluasi untuk mengidentifikasi proses UAT tersebut. Untuk pengumpulan data survei, BPS menggunakan *User Acceptance Testing*, dimana UAT tersebut berguna untuk mengidentifikasi potensi masalah yang belum terungkap, misalkan tentang kesilapan dalam pembuatan laporan manajemen anggaran.

### B. Aplikasi *Back Office Selindo*

*Back Office Selindo* (BOS) merupakan sebutan bagi Sistem Informasi Manajemen yang terkonsolidasi dalam mendukung siklus APBN di lingkungan Badan Pusat Statistik. *Back Office Selindo* dapat diakses pada laman <https://backoffice.bps.go.id> melalui *browser*. Aplikasi ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan yang terstruktur dari pusat dan daerah, mengikuti perkembangan teknologi *e-reporting* yang semakin pesat. Efisiensi energi dan pelestarian ekosistem dapat tercapai melalui pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dalam pelaporan yang lebih terstruktur dan rapi sehingga dapat turut berkontribusi secara positif terhadap perubahan iklim. Berdasarkan peran masing-masing unit kerja di setiap satuan

kerja, operasional Aplikasi BOS dilaksanakan. Aplikasi BOS sendiri telah mengalami peningkatan ketangguhan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan (*Tim Backoffice*, 2022).

Sistem informasi terpadu yang dikenal sebagai BOS, secara bersamaan beroperasi di tingkat pusat dan daerah (meliputi 517 satuan kerja), mengintegrasikan berbagai aspek manajemen seperti Manajemen Anggaran, Keuangan, Belanja, Pengadaan, hingga Kekaryawanan. Dalam pengelolaan anggaran, BOS turut mendukung segala bentuk transaksi atau kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, hingga pemantauan serta evaluasi. Pemahaman yang tepat dari para pengelola anggaran dan keuangan pemerintah diperlukan dalam upaya mencapai tata laksana pemerintahan yang baik, mengingat dinamisnya perkembangan peraturan terkait yang diterbitkan pemerintah. Berlandaskan hal tersebut, aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang telah dijabarkan sebelumnya (<https://backoffice.bps.go.id>).

### C. Sistem Manajemen Anggaran

Dalam suatu organisasi, berbagai proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan lainnya tercakup dalam lingkup manajemen. Sementara itu, data yang telah mengalami pengolahan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan makna bagi suatu organisasi dapat disebut sebagai informasi (Yulianto, et al., 2023).

Inti dari manajemen anggaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan upaya yang disengaja serta sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan, termasuk pembinaan berkelanjutan terhadap biaya operasional. Sistem informasi yang dikenal sebagai sistem manajemen diperlukan dalam organisasi untuk mengolah seluruh transaksi yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan (Hade, et al., 2019). Dalam pengambilan keputusan, penyajian informasi yang akurat, tepat, dan cepat kepada pihak terkait menjadi krusial. Hal ini dapat dicapai melalui sistem informasi manajemen yang mencakup metode terorganisasi dalam mengumpulkan data, baik dari internal maupun eksternal organisasi, serta memanfaatkan komputer dalam proses pengolahannya (Putri, et al, 2023).

Indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah sistem manajemen anggaran, seperti halnya sistem lain yang memerlukan proses untuk berjalan, antara lain:

1. Perencanaan, dalam sistem manajemen anggaran, dana yang diterima atau masuk dikenal sebagai dana masukan (*input*) yang kemudian akan dialokasikan melalui proses perencanaan anggaran (*budgeting*),
2. Pengendalian, kemudian diterapkan dalam pelaksanaan proses/operasional (*throughput*).
3. Pengambilan keputusan, yaitu pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha (*output*) yang dihasilkannya (Kiswanto, et al., 2021).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan, mengorganisir, menafsirkan, dan menganalisis data untuk menggambarkan suatu situasi tertentu serta menarik kesimpulan. Kemudian, menurut Sumadi (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang secara sistematis, faktual, fakta dan karakteristik populasi atau daerahnya dijabarkan secara detail atau rinci. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023.

Kajian ini dilaksanakan oleh kantor BPS Kota Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Laksamana Malahayati, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur secara langsung dengan informan yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan tujuan

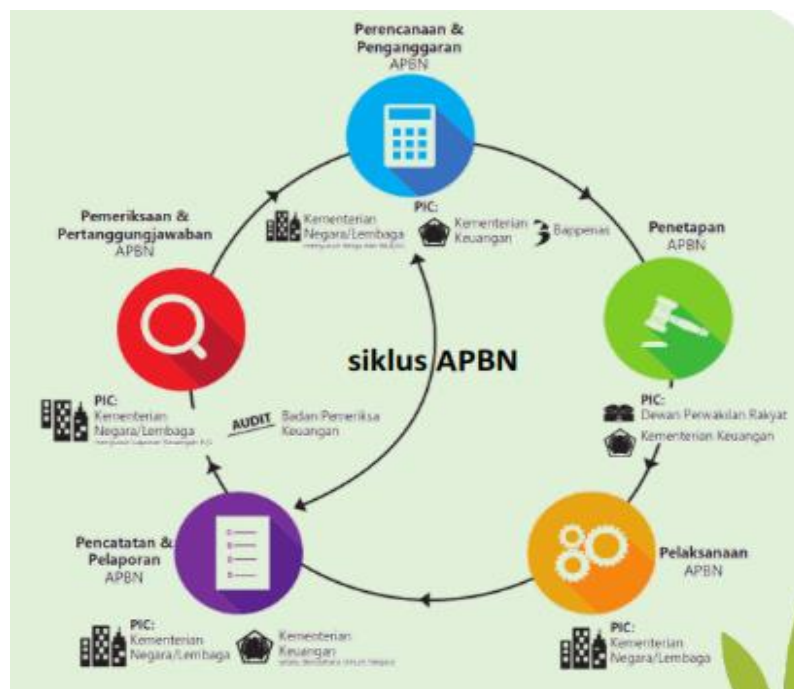
penelitian ini. Data tersebut disajikan dalam bentuk wawancara yang mendalam (*in depth interview*) dengan Kepala Subbagian Umum dan satu orang Staf bagian keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2017), teknik analisis ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah metode menyederhanakan data yang telah didapatkan atau dikumpulkan dari proses pengumpulan data. Data dicatat secara rinci dalam laporan yang relevan, kemudian dirangkum, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal penting. Selanjutnya, data disaring dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan konsep, tema, atau kategori tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dari data yang telah diobservasi.
2. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah, kemudian disajikan dalam bentuk transkrip. Metode ini membantu peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar data yang telah terkumpul.
3. Validasi data adalah proses yang dilakukan selama proses penelitian untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan. Dengan melakukan validasi data, peneliti dapat memberikan makna pada temuan tersebut dan menggunakannya sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian yang komprehensif.
4. Kesimpulan akhir dirumuskan berdasarkan temuan awal yang telah divalidasi. Proses perumusan kesimpulan ini dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Backoffice System* adalah sistem informasi manajemen terpadu yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mendukung seluruh siklus APBN. Sistem ini mencakup berbagai modul, mulai dari perencanaan anggaran, penetapan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Seluruh modul ini berjalan bersamaan di tingkat pusat dan daerah dan mencakup 517 satuan kerja.



**Gambar 1. Sistem Aplikasi *Back Office Selindo***

Adapun alur sebelum dan sesudah penerapan aplikasi *Back Office Selindo* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Alur Sebelum dan Sesudah Penerapan *Back Office Selindo***

No.	Proses	Sebelum Penerapan Aplikasi	Sesudah Penerapan Aplikasi
1.	Penerimaan dokumen	Dokumen diterima secara manual, perlu pengecekan fisik	Dokumen diterima secara digital, verifikasi otomatis.
2.	Pengarsipan	Dokumen diarsipkan secara fisik di gudang arsip	Dokumen diarsipkan secara digital di sistem aplikasi
3.	Pencarian dokumen	Pencarian dokumen membutuhkan waktu yang lama dan manual	Pencarian dokumen cepat dan otomatis melalui aplikasi
4.	Pengolahan data	Data diolah secara manual menggunakan <i>spreadsheet</i>	Data diolah secara otomatis dengan aplikasi <i>back office selindo</i> .
5.	Persetujuan dokumen	Persetujuan dilakukan dengan tanda tangan manual	Persetujuan dilakukan secara digital melalui aplikasi
6.	Pelaporan	Laporan disusun secara manual dan membutuhkan waktu lama	Laporan disusun secara otomatis dan cepat
7.	Pemantauan	Pemantauan kinerja dan status dokumen dilakukan manual	Pemantauan kinerja dan status dokumen <i>real time</i> di aplikasi
8.	Keamanan data	Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik	Data tersimpan aman di server dengan <i>backup</i> otomatis
9.	Kolaborasi tim	Kolaborasi sulit karena keterbatasan akses fisik	Kolaborasi lebih mudah dengan akses berbagi dokumen <i>online</i> .

Sumber: Dokumentasi BPS Kota Banda Aceh.

Berdasarkan dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan aplikasi *Back Office Selindo*. Hal tersebut dapat dilihat dari proses penerimaan dokumen, pengarsipan, pencarian dokumen, pengolahan data, persetujuan dokumen, pelaporan, pemantauan, keamanan data dan kolaborasi tim. Melalui aplikasi *Back Office Selindo* ini, pengelolaan manajemen anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

#### **A. Penerapan Aplikasi *Back Office Selindo* Pada Manajemen Anggaran di BPS Kota Banda Aceh**

Penerapan manajemen anggaran yang dilakukan oleh BPS Kota Banda Aceh dengan menggunakan aplikasi *Back Office Selindo*, isi dari aplikasi tersebut yaitu mencakup modul perencanaan dan penganggaran, modul penetapan rencana kerja dan anggaran, modul pelaksanaan anggaran, modul pencatatan dan pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Sehingga jika dikaitkan dengan apa yang diungkapkan Kepala Subbagian Umum BPS Kota Banda Aceh bahwasannya aplikasi *Back Office Selindo* mencakup perencanaan (penganggaran), penatausahaan (pengendalian), dan pelaporan (pengambilan keputusan), dengan demikian, aplikasi ini telah mencapai kesesuaian dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Subbagian Umum BPS Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa:

“*Back Office Selindo* yang dilakukan oleh BPS Kota Banda Aceh memberikan perubahan yang besar, karena melalui BOS ini lebih memudahkan karyawan atau karyawan untuk melakukan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya pelaporan keuangan, dengan adanya aplikasi *Back Office Selindo* efisiensi terkait waktu dan prosedur pengelolaan keuangan secara langsung akan lebih mempercepat capaian tujuan organisasi, dimana aplikasi *Back Office Selindo* memiliki peran dalam

membantu individu dalam melakukan pekerjaannya dimulai dari tingkatan manajemen bawah hingga individu pada tingkat manajemen atas yaitu pimpinan dalam pengambilan keputusan” (hasil wawancara, 15 Desember 2023).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi aplikasi *Back Office Selindo* dalam manajemen anggaran di BPS Kota Banda Aceh meliputi:

1. Perencanaan

Tahapan awal penerapan Aplikasi *Back Office Selindo* merupakan serangkaian proses dalam menyusun program dan kegiatan BPS melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA maupun penyusunan anggaran kas yang dilakukan selama setahun penggunaan anggaran. Setelah masuk dengan menggunakan *user manual* dan *password* yang diminta, langkah selanjutnya adalah mengakses menu *data entry* untuk memasukkan informasi mengenai *header* karyawan, perencanaan kegiatan (termasuk anggaran) untuk hasil, dan penyusunan laporan RKA.

2. Pengendalian

Pengendalian dalam aplikasi *Back Office Selindo* BPS Kota Banda Aceh mencakup berbagai prosedur dokumen. Panduan manual prosedurnya dimulai dengan langkah yang hampir serupa dengan sistem penganggaran, dan hasilnya juga tercatat di bagian Laporan Tata Usaha yang membimbing operator untuk memilih setiap detail dokumen yang diperlukan. Proses pengendalian keuangan melibatkan penginputan beberapa dokumen seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), serta berbagai register dan formulir pengendalian anggaran lainnya.

3. Pengambilan keputusan

Prosedur pelaporan anggaran melalui Aplikasi *Back Office Selindo* BPS Kota Banda Aceh bertujuan untuk menyediakan database mengenai keuangan yang telah tersimpan di dalam aplikasi *Back Office Selindo* BPS Kota Banda Aceh. Adanya database ini akan menjadi dasar bagi BPS Pusat dalam pengambilan keputusan oleh BPS Pusat.

Implementasi aplikasi *Back Office Selindo* (BOS) di BPS Kota Banda Aceh telah memberikan perubahan pada administrasi keuangan, membawa perubahan yang signifikan dalam setiap tahap siklus anggaran. Sebelumnya, proses administrasi keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaporan, melibatkan banyak pekerjaan manual, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Aspek-aspek dasar yang berkaitan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), seperti rincian program anggaran, seringkali menjadi hambatan karena kompleksitas dan banyaknya dokumen yang terlibat. Dengan adanya Aplikasi BOS, seluruh proses administrasi keuangan menjadi lebih efisien dan efektif.

Menurut hasil Jamil, et al,m (2022), adanya database ini menjadi solusi untuk mengumpulkan berbagai data penting seperti catatan penyelesaian suatu masalah transaksi, menyimpan formulir yang jarang digunakan namun ada kemungkinan untuk digunakan sehingga formulir tersebut tidak hilang karena terselip juga berguna untuk menyimpan data surat kuasa nasabah untuk pengambilan warkat.

Aplikasi *Back Office Selindo* (BOS) mempermudah pengelolaan keuangan termasuk pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi waktu dan prosedur langsung dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, BOS juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap transaksi keuangan, mulai dari pengeluaran hingga penerimaan dicatat secara langsung atau *real-time* dalam sistem. Informasi ini dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pemantauan dan

pengawasan. Adanya aplikasi *Back Office Selindo* juga memberikan efektivitas pengambilan keputusan karena individu dari tingkatan manajemen dapat mengakses dan melihat data yang relevan secara langsung. Perubahan positif ini sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson dalam Satries (2016), yang menjelaskan bahwa efektivitas terbagi tiga yang mencakup efektivitas individu, kelompok, dan organisasi.

## **B. Manfaat Aplikasi *Back Office Selindo* Pada Manajemen Anggaran di BPS Kota Banda Aceh**

Adanya sebuah kebijakan harus memiliki dampak yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat secara langsung bagi organisasi dan individu. Menurut pernyataan dari Staf bagian keuangan BPS Kota Banda Aceh adalah:

“Manfaat dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan karyawan dalam mengelola laporan keuangan, karena bentuk laporan keuangan sudah terformat dan karyawan hanya mengikuti prosedural yang ada di aplikasi BOS. Prosedural ini lebih efisien dan efektif untuk di terapkan. Salah satu proses yang dilalui adalah di sebut rekonsiliasi yaitu pencocokan data-data transaksi yang ada”. (hasil wawancara, 15 Desember 2023).

Pemanfaatan aplikasi *Back Office Selindo* yang dilakukan oleh BPS Kota Banda Aceh memberikan kemudahan pengelolaan laporan keuangan, sehingga manfaat yang diterima oleh BPS Kota Banda Aceh dengan menggunakan aplikasi *Back Office Selindo*, sebagai berikut:

### 1. Dapat dipercaya

Dari hasil yang telah ditelaah menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi *Back Office Selindo* dapat dipercaya. Hal ini didukung dengan adanya proses verifikasi dan pembahasan yang ketat sebelum pencairan dana, sehingga kesalahan dapat terdeteksi dan diperbaiki. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dan akurat.

### 2. Ketepatan

Jika dilihat dari keakuratan format dan bentuk laporan keuangan, Aplikasi *Back Office Selindo* telah menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses rekonsiliasi, yaitu pencocokan data transaksi yang ada. Pada proses rekonsiliasi ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan memenuhi persyaratan pelaporan keuangan pemerintah.

### 3. Tepat Waktu

Dengan sifatnya yang otomatis, sistem aplikasi *Back Office Selindo* memungkinkan data yang dimasukkan satu kali *entry* dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Hal ini berdampak pada runtutan proses penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan yang menjadi lebih ringkas dan tepat waktu dengan penerapan aplikasi ini.

Hasil penelitian dari Artawan & Suhartana (2019) pengembangan aplikasi Back-End SIM-MITRA (Sistem Informasi Manajemen Mitra Statistik) BPS Kota Denpasar yang dapat digunakan untuk mengatur segala proses yang terkait dengan perekrutan dan manajemen data mitra statistik. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, data mitra statistik pada BPS Kota Denpasar menjadi lebih tertata dan terstruktur.

## **C. Hambatan Dalam Penerapan Aplikasi *Back Office Selindo* Pada Manajemen Anggaran di BPS Kota Banda Aceh**

Membahas mengenai perangkat teknologi, tentunya akan ditemukan hambatan dalam penerapannya di kemudian hari menurut pernyataan dari Kepala Subbagian Umum BPS Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa:

“Hambatan dalam penerapan aplikasi *back office selindo* pada manajemen anggaran adalah ada di sumber daya manusianya, karena dibutuhkan kemahiran karyawan dalam mengaplikasikan *back office selindo*. Masih kurangnya pelatihan yang diberikan untuk karyawan, sehingga pemahaman karyawan tentang aplikasi BOS, masih kurang. Hambatan berikutnya adalah tentang jaringannya, kadang-kadang "lambat atau tidak bisa terkoneksi pada waktu-waktu tertentu” (hasil wawancara, 15 Desember 2023).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, dengan demikian diketahui bahwasanya adapun hambatan dalam penerapan aplikasi *back office selindo* pada manajemen anggaran di BPS Kota Banda Aceh yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Aplikasi *Back Office Selindo* yang terus diperbarui menuntut kemahiran khusus dari penggunaannya, idealnya didukung latar belakang pendidikan IT. Pergantian karyawan yang sering terjadi dapat mengganggu kelancaran operasional aplikasi ini karena perlunya pelatihan tambahan bagi karyawan baru. Oleh karena itu, teknologi yang optimal turut membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman sehingga pra-kualifikasi dan kestabilan tim menjadi faktor krusial dalam menjaga efektivitas penggunaan aplikasi *Back Office Selindo*.

2. *Software* dan Jaringan

Penerapan sistem antar instansi masih seringkali menghadapi kendala yang cukup krusial, terutama dalam hal integrasi yang belum optimal khususnya dalam hal perangkat lunak dan jaringan. Masalah umum lainnya adalah terkait jaringan internet, karena aplikasi *Back Office Selindo* harus menggunakan VPN, yang terkadang lambat atau tidak bisa terkoneksi pada waktu-waktu tertentu.

## KESIMPULAN

*Output* yang dihasilkan dalam penerapan aplikasi *Back Office Selindo* pada Manajemen Anggaran di BPS Kota Banda Aceh yaitu mencakup modul perencanaan dan penganggaran, modul penetapan rencana kerja dan anggaran, modul pelaksanaan anggaran, modul pencatatan dan pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Maka tujuan dari penerapan aplikasi *Back Office Selindo* ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan menyediakan sistem yang menghasilkan laporan dan informasi keuangan yang lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Artawan, K. N., & Suhartana, K. G. (2019). View of Pengembangan Aplikasi Back-End SIM-MITRA (Sistem Informasi Manajemen Mitra Statistik) BPS Kota Denpasar. *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana*.
- Gunardi, G., Ikhsan, S., & Arisena, A. (2019). Sistem Informasi Honorarium Berbasis Web Di Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung. *Jurnal Co Management*, 1(1), 183-196.
- Hade, S., Djalla, A., & Rusman, A. D. P. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Rsud Andi Makkasau Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(2), 293-305.
- Jamil, A., Bachtiar, S., & Widyastuti, D. D. (2022). Manajemen Back Office Berbasis Teknologi Informasi Pada Pt. Bank Central Asia, TBK. *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 9(1), 71-82.
- Kadir, Abdul. (2016). *Konssep dan Tuntunan Praktis Basis Data*. Yogyakarta : Andi. Al Fatta.
- Kiswanto, B., Irsan, M., & Nengsih, R. (2021). Perancangan Aplikasi Sistem Manajemen Anggaran Perjalanan Dinas Luar Kota Berbasis Java Pada PT. AMBC. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 4(4), 314-322.
- Ningsih, S., Wirahadi, A., & Fontanella, A. (2018). Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja dengan konsep money follow program dalam perencanaan dan penganggaran kota padang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 1-16.
- Putri, N. D., Oktofa, M. A., Rahmadhani, A. A., & Nurbaiti, N. (2023). Pentingnya Peranan Perangkat Keras Dalam Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 67-74.
- Saputra, S., & Prasetyo, A. B. (2022). Pembuatan dan Implementasi Aplikasi Backoffice untuk Menopang Kebutuhan Monitoring dan Reporting dari Aplikasi PPOB Mobile. *Scientia Sacra: Jurnal Sains, Teknologi dan Masyarakat*, 2(3), 263-271.
- Satries, W.I. 2016. Efektivitas Program Pmeberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan Alfatih Ibadurrohman Kota Bekasi. *Tesis*. Universitas Indonesia, Salemba.
- Sumadi. (2015). *Metodologi Penelitian Cetakan Ke-25*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sutjipto, T. M. C. (2020). Penerapan Adopsi Teknologi Model UTAUT untuk Sistem Layanan Samsat Terintegrasi Berbasis Mobile. *Jurnal Manajemen Informatika*, 10(02).
- Tim Backoffice*. 2022. *Panduan Aplikasi BOS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Yulianto, A., Utaminingsih, N. S., SE, M., Sari, M. P., & Akt, C. A. (2023). *Sistem Informasi Manajemen*. Cahya Ghani Recovery.